PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 29 November 2013 Halaman: 4

CEGAH KORUPSI

# Yogyakarta Terapkan Whistle Blower System

**YOGYA (MERAPI)** - Untuk mencegah potensi korupsi, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan *Whistle Blower System* (WBS). Melalui sistem WBS masyarakat dapat melaporkan langsung dugaan korupsi di lingkup Pemkot.

"Saat ini kami masih mematangkan konsepnya agar bisa diterapkan. Ini salah satu bentuk komitmen untuk memberantas korupsi," kata Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik, Fitri Paulina Andriani di sela Lokakarya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Balaikota Kamis (28/11).

Konsep WBS rencananya juga akan terhubung dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sudah bisa berfungsi. Ditargetkan tahun depan sistem itu dapat tersambung.

Selain itu akhir tahun ini Inspektorat Kota Yogyakarta juga akan membuat regulasi mengenai gratifikasi serta MoU dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemeriksaan rekening pegawai Pemkot.

Sementara itu Ketua Direktorat Pembinaan Jaringan Antar Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Insan Fahmi mengatakan pencanangan WBS sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Setiap pemerintah daerah wajib memiliki WBS tahun depan.

Selain itu secara tidak langsung WBS juga terhubung dengan unit pengaduan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi dari informasi yang ada bisa ditelusuri pemerintah. Jika ada indikasi korupsi di atas Rp 1 milir bisa ditangani KPK," kat Insan.

Pihaknya mengapresiasi Inspektorat Kota Yogyakarta yang akan menerapkan BWS. Menurutnya yang harus diperhatikan adalah jalannya sistem itu harus dikelola secara fokus. **(Tri)-a**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Bagian Hukum<br>2. Inspektorat | Positif | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005